

Perubahan Ekonomi dan Perkembangan Peradaban Islam di Palembang Abad XVII – XIX M: Telaah atas Naskah-naskah Kontrak Sultan Palembang

Endang Rochmiatun

Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang
endang_dbj@yahoo.com

Abstrak

Artikel ini berbicara tentang hubungan antara perubahan dan perkembangan ekonomi selama Kesultanan Palembang, terutama di era Sultan Mahmud Badaruddin I (1724-1757). Tujuan dari artikel ini adalah untuk menjawab pertanyaan: apa sektor ekonomi yang memberikan manfaat bagi Sultan, sehingga ia mampu memperluas peradaban? Bagaimana strategi Sultan Palembang dalam memajukan ekonomi yang mampu memengaruhi perkembangan peradaban Islam di Palembang. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa “lada” merupakan komoditas penting sebagai sumber pendapatan utama kesultanan. Sumber pendapatan lain datang dari “timah” yang berasal dari wilayah koloni yang bernama Bangka. Sultan Palembang melakukan dua bisnis yang saling bertentangan pada waktu yang sama: melakukan bisnis yang legal dengan pelindungnya VOC, dan di sisi lain, ia juga melakukan perdagangan timah di pasar gelap. Selanjutnya, ia juga menjual barang-barang lain yang benar-benar dilarang oleh VOC untuk membiayai penambangan timah. Keuntungan dari perdagangan ini mampu membawa kemakmuran Kesultanan Palembang dan kemajuan peradaban. Misalnya, Sultan mampu membangun kendaraan dan beberapa lembaga Islam.

Kata Kunci: *Palembang Sultanate, Sultan Mahmud Badaruddin, VOC, timah, lada*

Abstract

This paper concerns on the relationship between the changing and development of economy during the Palembang's Sultanate, especially in the era of Sultan Mahmud Badaruddin I (1724-1757) and the development of Islamic civilization. The objectives of this essay are to answer these questions; what economic sectors are that give benefits to the Sultan, so that he was able to expand the civilization? How are the Sultan of Palembang's strategies to make economic advancement which affected to the development of Islamic civilization in Palembang. Finding of this research shows that the "pepper" from the headwaters area was an important commodity that played as the main source of income for sultanate. Another primary source of revenue came from "tin" which was from its colony named Bangka. Sultan of Palembang operated two contradict businesses at the same time; the first, he did a legal business with his protector namely VOC. On the other hand, he also traded tin in the black market in order to gain the redemption benefits. Furthermore, he also sold other goods which were actually prohibited by VOC, this aimed to finance the tin mining. The profits of trading on tin brought prosperity to Palembang Sultanate and advancement in civilization, for instance Sultan build vehicle and several Islamic institutions.

Keywords: Palembang Sultanate, Sultan Mahmud Badaruddin, VOC, pepper, tin

Pendahuluan

Studi Meilink Roelofsz yang sangat berpengaruh dalam penulisan sejarah Indonesia pada masa VOC, menyebutkan bahwa sistem monopoli perdagangan pada masa tersebut diikuti dengan kekerasan fisik, perang antar kedua belah pihak,¹ serta menganggap bahwa selama ini raja-raja Melayu, khususnya Sultan Palembang, selalu dipandang sebagai bawahan atau subordinat dari VOC, yang lemah, tidak berdaya, dan selalu tunduk pada sistem dagang VOC yang monopolistik dengan aturan kontrak yang dikeluarkan VOC. Kajian terhadap manuskrip yang berisi nota kesepahaman atau kontrak antara para Sultan Palembang dengan pihak VOC setelah dianalisis ternyata bisa menepis anggapan tersebut. Sultan Palembang, terutama Sultan Mahmud Badaruddin I (1724-1757), telah membuktikan bagaimana cara memenuhi politik monopoli

¹ M.A.P Meilink-Roelofsz (ed.), *Dutch author on Asian History: Selection of Dutch Historiography on the Verenigde Oostindische Compagnie. Dordrecht [etc].* Foris Publications, 1998.

perdagangan VOC di satu pihak, dan pada pihak lain membuktikan bagaimana cara untuk memperoleh keuntungan dengan negosiasi-negosiasi yang menjurus pada perbaikan harga komoditas yang dimonopoli VOC pada masa itu.

Sebagaimana diketahui, Kesultanan Palembang merupakan kelanjutan dari Kerajaan Majapahit, Demak, Pajang, dan Mataram. Setelah Kerajaan Sriwijaya lemah dan dikalahkan oleh Majapahit, daerah-daerahnya berada di bawah kekuasaan kerajaan Majapahit. Dalam sejarah tutur Palembang, Adipati Majapahit yang berkuasa di Palembang adalah Ario Damar (1455-1486 M). Ia adalah putra Prabu Brawijaya Sri Kertawijaya. Setelah Ario Damar wafat, penguasa Palembang adalah Pangeran Sedo Ing Lautan (1547-1552 M).² Jika diamati antara wafatnya Ario Damar pada 1486 M dan berkuasanya Pangeran Sedo Ing Lautan pada 1547 M, maka terjadi masa kekosongan selama 61 tahun.

Hal tersebut jika dikaji ternyata pada 1478 M Kerajaan Demak telah berdiri di bawah kekuasaan Raden Fatah (anak tiri Ario Damar) dan Majapahit telah dikalahkan oleh Kerajaan Demak. Hal tersebut berarti pada masa akhir kekuasaan Ario Damar di Palembang, sebenarnya sudah tidak lagi di bawah protektorat kerajaan Majapahit, tetapi beralih ke kerajaan Demak. Disebabkan oleh situasi kerajaan Demak ketika itu masih disibukkan oleh pembinaan di dalam, sehingga belum menjangkau daerah luar seperti Palembang, sehingga wajar apabila pengganti Ario Damar tidak ditetapkan secara formal oleh pusat kerajaan.

Setelah Majapahit ditaklukan Demak situasi dan kondisi Palembang seperti negara tak bertuan, karena tidak ada penegasan dari Demak. Barulah pada 1547 M seorang pangeran dari Surabaya, yakni Pangeran Sedo ing Lautan, salah seorang keturunan Raden Fatah, ditunjuk menjadi wakil penguasa Demak di Palembang. Hal ini sebagai bentuk peralihan kekuasaan protektorat secara formal atas Palembang dari Majapahit kepada Demak.

Pada saat terjadi huru-hara antara Demak dan Pajang, serombongan priyayi meninggalkan Demak menuju Palembang.

² Ali Amin, "Sejarah Kesultanan Palembang dan Beberapa Aspek Hukumnya", dalam K.H.O Gadjah Nata dan Sri-Edi Swasono (ed.), *Masuk dan Berkembangnya Islam di Sumatera Selatan*, (Jakarta: UI Press, 1986), h. 74.

Rombongan tersebut dipimpin oleh Ki Gede Ing Suro Tuo. Ia merupakan putra dari Pangeran Sedo Ing Lautan. Dalam sejarah tutur Palembang Ki Gede Ing Suro Tuo dianggap raja pertama Palembang. Hal tersebut dihubungkan dengan kepergiannya ke Palembang dalam suasana pengambilan kekuasaan Demak oleh Pajang. Pendirian kerajaan Palembang tersebut dimaksudkan untuk menun-jukkan kesetiaan kepada Demak yang dikalahkan.³

Pada saat Palembang di bawah kekuasaan Demak, hubungan dengan pusat pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan masih berlangsungnya penyampaian upeti ke pusat pemerintahan Demak. Hubungan tersebut menjadi kurang baik setelah pusat kerajaan dialihkan ke Mataram. Seperti halnya ketika Pangeran Sedo Ing Kenaya *milir sebo*⁴ pada 1642 M dan 1644 M ke Mataram, namun kurang diterima dengan baik serta ditolak oleh Sultan Amangkurat I. Hal ini juga dialami oleh penguasa Palembang selanjutnya, yakni Pangeran Sedo Ing Rajek maupun Ki Mas Endi. Perlakuan dan sikap Sultan Mataram tersebut menyebabkan Ki Mas Endi (1659-1706 M) melepaskan ikatan dengan Mataram dan menyatakan bahwa Palembang sebagai Kesultanan yang berdiri sendiri. Ki Mas Endi juga menggunakan gelar Sultan untuk pertama kalinya dalam kekuasaan di Palembang, yakni dengan gelar *Sultan Abdurrahman Khalifatul Mukminin Sayyidul Imam*. Dengan demi-kian, dialah yang mengubah tradisi dalam pemakaian gelar nama-nama penguasa dengan corak Islam.

³ Penguasa Palembang berturut-turut sebelum Sultan pertama (Kesultanan Palembang) adalah: 1) Ario Dillah dikenal dengan sebutan Ario Damar (145-1486 M); 2) Pangeran Sedo Ing Lautan (1547-1552 M); 3) Ki Gede Ing Suro Tuo (1552-1573 M); 4) Ki Gede Ing Suro Mudo (1573-1590 M); 5) Ki Mas Adipati (1590-1595 M); 6) Pangeran Madi Ing Angkoso (1595-1629 M); 7) Pangeran Madi Alit (1629-1630 M); 8) Pangeran Sedo Ing Puro (1630-1639 M); 9) Pangeran Sedo Ing Kenayan (1639-1650 M); 10) Pangeran Sedo Ing Pasarean (1651-1652 M); 11) Pangran Sedo Ing Rajek (1652-1659 M). Setelah tahun 1659 yang berkuasa adalah Ki Mas Endi, dan dialah yang mengukuhkan diri sebagai Sultan pertama Kesultanan di Palembang serta Islam menjadi agama resmi Kesultanan. Lihat *ibid.*, h. 73.

⁴ *Milir Sebo* adalah upacara menghadap Sultan dengan membawa barang persembahan (upeti) sebagai persyaratan tunduk. Acara ini biasanya diadakan dalam waktu-waktu tertentu.

Sejak saat itu pemerintahan yang bercorak Islam terbentuk yakni Kesultanan Palembang.

Selama kira-kira dua abad Palembang menjadi wilayah kekuasaan kerajaan-kerajaan Islam di Jawa. Setelah resmi menjadi Kesultanan yang berdiri sendiri — melepaskan diri dari protektorat kerajaan Mataram — Kesultanan Palembang semakin meningkatkan usaha menerapkan hukum Islam. Struktur Kesultanan Palembang juga terus disesuaikan dengan ketentuan ajaran Islam.

Salah satu warisan sejarah peradaban Islam yang ada di Palembang dan merupakan salah satu bentuk institusi keislaman adalah berupa Masjid Agung Palembang. Masjid ini terletak di wilayah Kelurahan 19 Ilir, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, tidak jauh dari benteng Kuto Besak dan tidak jauh dari sungai Musi. Masjid ini dibangun oleh Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Wikramo (SMB I) pada 1738 M dan diresmikan penggunaannya pada 1748 M. Bentuk masjid ini adalah bujur sangkar, beratap tumpang dua. Masjid ini menandai puncak kemajuan peradaban Islam pada masa Kesultanan Palembang.

Seorang Residen Inggris, M.H Court yang berkedudukan di Mentok mengakui bahwa Masjid Agung Palembang adalah masjid terbesar di nusantara pada saat itu. Seorang pejabat VOC Hemmij, ketika itu bahkan pernah menghitung kekayaan Sultan yang berkuasa pada masa itu sekitar 60 juta Real Spanyol.⁵ William Marsden yang mengelilingi Sumatra dan pernah singgah di Palembang juga mengatakan bahwa negeri ini pada masa itu telah melimpah kekayaannya dan memiliki mata uang sendiri yang terbuat dari timah. Mata uang tersebut dikenal dengan sebutan "pitis".⁶

Artikel ini adalah suatu usaha untuk melihat keterkaitan antara perubahan dan kemajuan ekonomi pada pada masa Kesultanan Palembang, terutama pada periode Sultan Mahmud Badaruddin I (1724-1757 M) dengan adanya kemajuan peradaban Islam yang

⁵ Reinout vos, *Gentle Janus, merchant Prince : The VOC and The Tightrope of diplomacy in the malay World, 1740-1800*, (Leiden: KITLV Press, 1993), h. 7-8.

⁶ William Marsden, *The History of Sumatra*, (Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1975), h. 361.

dibangun oleh Sultan Palembang. Pertanyaan yang diajukan di sini adalah keuntungan dari bidang apa, Sultan Palembang bisa membangun peradaban yang maju pada zamannya dan bagaimana strateginya, sehingga dapat mewujudkan kemajuan ekonomi yang berdampak pada kemajuan peradaban Islam di Palembang.

Artikel ini merupakan hasil bacaan atas sumber-sumber manuskrip. Sumber tersebut berupa manuskrip masa VOC yang tersimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia, yakni berupa *Naskah Kontrak-Kontrak antara Sultan Palembang dengan VOC*. Di antara manuskrip tersebut antara lain adalah:

Renovatie de Contracten met de Koningen van Palembang Dee 1622, 1678, 1679 en 1684 Det 25 Januari 1691 M, Renovatie de Contracten met Sulthan Seri Ratu ... Palembang 2 Juni 1722 Contract Palembang 10 September 1755, Renovatie der Contracten Tirs schen den Koming van Palembang En Comp 15 Juni 1763, Contract met Palembang 25 Desember, Original Acte van Renovatie der voorige Contracten met de Koningen van Palembang, Met den Paduka Seri Sulthan Ratu Muhammad Baha'uddin, en den kroon prins Pangeran Ratu, Op den 31 Agustus 1791 en 28 November 1891, Qaull al-Haq Wakalamah al- Shadiq, Contract met Palembang d.d 18 Agustus 1823.

Sebagaimana diketahui bahwa arsip merupakan salah satu dokumen tertulis yang dapat berfungsi sebagai pembuka pintu gerbang masa lalu. Dengan arsip kita bisa memetik kearifan dari hal-hal yang terjadi di masa lampau sebagai teladan dan kita bisa membandingkan dengan peristiwa yang berlangsung di masa sekarang.

Bisnis Lada dan Timah Sultan Palembang: Antara Monopoli dan Negosiasi

Pada awal abad XVIII permintaan timah di pasar internasional mengalami peningkatan. Hal ini sejalan dengan meningkatnya perdagangan baik di kawasan Asia Tenggara maupun antara Eropa dan Asia (Asia Selatan, Asia Tenggara dan Asia Timur). Itulah sebabnya tidak mengherankan jika usaha-usaha yang dilakukan oleh VOC ke daerah-daerah baru juga semakin meningkat. VOC yang pada abad XVII telah menampung timah di Malaka semakin

giat memonopoli perdagangan timah melalui daerah-daerah yang dipim-pin oleh para Sultan Melayu. Sejak timah di Bangka ditemukan pada kira-kira tahun 1710, sekitar 12 tahun sesudah itu, yaitu tahun 1722, VOC berhasil mengadakan kontrak monopoli perdagangan timah dengan Sultan Palembang, di pulau yang merupakan daerah taklukan Kesultanan Palembang tersebut. Kontrak monopoli ini sebagaimana bunyi dalam perjanjian *Renovatie de Contracten met Sulthan Seri Ratu ... Palembang 2 Juni 1722*:

Perkara yang ketujuh

....Bahwa perjanjian Seri Sulthon Ratu segala (.....) yang dikumpulkan di dalam pulau atau tanah Bangka itu Seri Sulthon Ratu suruh bawa timbang maka dijual atau dihand-tarkan ke dalam gudang kompeni maka supaya begitu lama (.....) itu bergaun kepada kompeni atau suka menerima oleh harganya seperti yang dahulu itu sepuluh (.....) tua sepikul dari seratus dua puluh lima pintu wilanduwia maka hendaklah bersih baik-baik timah putih itu dan jangan dilancang maka hendaklah dibuat tampang persegi empat baratnya kurang atau lebih sedikit dari dua pintu wilanduwia atau sedikit lebih kehendak kompeni dibelah tampang itu karena hendak diperiksa (.....) tidaknya.....

23. *Perkara yang kedelapan*

Bahwa sekali-kali tidak dapat seseorang juapun membawa jenis perniagaan atas ingin dalam kerajaan Palembang melainkan kompeni sendiri jua akan tetapi barang siapa ada beroleh izin dengan surat cap pelayaran daripada Palembang maka dapat beroleh membawa barang dagangan dan berjual beli dalam kerajaan Palembang yaitu seperti (apin) dan segala jenis warna kain-kain dari (bangka mandad surati) dan (tetu.....) hanya apabila tiada ada surat capnya daripada kompeni maka yaitu atas denda dihukum beserta dari (.....) segala arta isi muatan perahunya itu dibagi dua setengah akan perolehan raja dan setengah perolehan kompeni maka atas perihal itu hendaklah seyogianya melarangkan dan mencegah pula atas orang-orang yang bersembunyi mengeluarkan lada maka pada

pihak kompeni akan ditaruh perahu atau rumah jaga-jaga baik di darat atau di rakit dari segala teluk rantau seruserukan dan segala (.....) sungai Palembang supaya dapat (menpahas) perahu yang hilir-mudik kalau-kalau ada barang dagangan lada dengan dimuatnya dalam perahu

24. *itu maka atas permintaan kapiten kompeni di Palembang itu hendaklah ditolong dengan seboleh-boleh barang kuasa Syahbandar kepada kapiten kompeni supaya segala lada atau (apin) atau barang kain dagangan yang didapatnya itu akan merampas semuanya atas perolehan kedua pihak demikian lagi akan perihal itu sekalian atau untuk dagang orang-orang asing yang duduk dalam kerajaan Palembang itu bahwa tiada sekali-kali beroleh akan (.....) dengan perahunya sendiri barang di mana tempat-tempat negeri melainkan hendaklah seyogianya minta surat cap berlayar kepada kapiten kompeni supaya dapat ia menunjuk manakala ia bertemu (.....) dengan kapal berjaga-jaga atau perahu (.....) kompeni maka (.....) dan orang-orang kompeni itu dapatlah memandang dengan kenyataan bahwa bukan orang penyamun dan tiadalah barang hianat aniaya atas hartanya melainkan ia datang kembali menyuruh berlayar dengan sejahteranya akan tetapi manakala ia datang kembali ke negerinya maka hendaklah (.....) itu mengantarkan kembali surat cap itu kepada kapiten kompeni pada tiap-tiap masa ketikanya maka kapiten kompeni akan boleh menyuruh periksa perahu itu karena bahwasanya surat cap itu terdapat tiada diberi jauh pergi berlayar melainkan pada pihak arah ke selatan negeri Palembang pada*
25. *ke Batawiah/Batavia bahwa tiada boleh singgah ke Bantan hanya pihak sebelah timur batawiah/Batavia sepanjang pantai luar tanah Jawa singgahnya dan lagi pada pihak sebelah barat tanah Palembang lalu kembali lagi tetapi manakala hendak pergi berlayar kepada barang di tempat negeri lain maka yaitu adalah patut memberi maklum dahulu meminta izin kita lalu kepada gubernur (.....) pun India supaya (.....) seperti mana patut atas (.....)*

Perkara yang Kesembilan

Apabila Seri Sulthon Ratu mengendaki barang jenis kain atau barang-barang benda yang lain-lain akan pakaian atau pekerjaan jua maka yaitu Seri Sulthon Ratu dan telah (muhtar) menuntut dan beroleh (.....) kapiten kompeni Palembang itu jikalau ada kain atau barang benda lain-lain yang dapat teradakan dalam pemegangannya itu dan jikalau tiada maka hendaklah ia menyuruh mempunyai atau menghasilkan ke Batawiah/Batavia kemudian dibayar harganya sekain mana yang telah tentukan pada melepaskan barang benda itu atau seperti kompeni sudah memutuskan harganya itu juga...41.7

Dalam perjanjian kesepakatan itu juga disebutkan bahwa tidak diizinkan bagi bangsa-bangsa lain untuk berdagang timah di Bangka dan Palembang. Dari sumber beberapa naskah kontrak-kontrak antara Sultan Palembang dengan VOC tersebut dapat diketahui bahwa, lada merupakan komoditas penting sebagai sumber pendapatan Kesultanan yang diperoleh dari wilayah atau daerah hulu, dan timah merupakan komoditas penting sebagai sumber pendapatan Kesultanan yang diperoleh dari wilayah atau daerah taklukannya, yakni Pulau Bangka. Seperti halnya dalam “Contract Palembang 10 September 1755” yang isinya merupakan kesepakatan-kesepakatan masalah kebijakan perdagangan lada dan timah.

Perkara yang Kedua

*..... Bahwa oleh orang-orang Kompeni atau Residenti Kompeni yang tiba ditulis hatinya kepada Kompeni boleh dikira-kirakan Residenti Kompeni amat menyuruh pula orang-orang Paduka Seri Sultan Ratu yang membuat kerugian kepada Kompeni, daripada mencuri **lada, timah** itulah sebab Kompeni kurang mendapat beroleh **lada** dengan **timah** sampai beberapa tahun // yang Kepala Kompeni tiada berisi dengan patutnya dari karena itulah Kompeni terkejut mendengar **butir lada** dan **timah** dicuri sini dibawa ke Negeri Cina*

....melainkan sekarang dijanjikan oleh Paduka Seri Sultan Ratu dengan hati suci hendak menjagai jangan boleh orang mencuri lada dengan timah, barang siapa melakukan seperti yang demikian itu yaitu dihukumkan dengan hukum ..ngadat tahta kerajaan di dalam negeri Palembang dari karena yang Paduka Seri Sultan Ratu boleh menurut seperti permintaan yang tersebut di dalam (surat) ini....⁷

Timah rupanya telah menggantikan komoditas lada yang meng-alami penurunan dalam produknya sejak tahun 1720. Kontrak perjanjian yang ditandatangani antara Sultan Palembang dengan VOC pada tahun 1722 mengindikasikan bahwa ada semangat perdagangan yang tinggi. Timah sepertinya sebagai komoditas perdagangan yang diunggulkan oleh Sultan Palembang, sehingga dapat dikatakan bahwa komoditas lada telah tergantikan oleh komoditas timah. Namun demikian, rupanya VOC memainkan politik monopoli perdagangan atas produk timah: seluruh timah yang ada di Bangka harus diserahkan seluruhnya kepada pihak VOC, dan VOC juga sebagai penentu harga yang diberlakukan. Selain itu, dalam perjanjian itu juga disepakati bahwa bangsa lain tidak diizinkan untuk berdagang timah di Bangka dan Palembang.

Adapun dari sumber lain menginformasikan tentang adanya seorang “Tiko” yang berarti saudara tua atau berarti juga “Tauke”. Istilah “Tauke” ini digunakan untuk menyebut jabatan yang disandang pertama kali oleh seorang Cina Muslim bernama Lim Tau Kian (Wan Abdul Hayat) yang berhubungan erat dengan Sultan Johor untuk membuka tambang timah di Mentok. Pada masa itu, Tiko dimanfaatkan oleh Sultan Palembang, karena ia menyadari bahwa dirinya kurang pengetahuan tentang teknologi penambangan dan juga karena kurang tenaga kerja. Itulah sebabnya, Sultan Palembang bekerjasama dengan orang Cina yang memiliki pengetahuan dalam teknologi penambangan dengan menempatkan Tiko.⁸

⁷ ANRI. Jakarta. *Contract Palembang 10 September 1755*, dalam Arsip VOC, No. 41.8.

⁸ Sutedjo Sujitno, *Legenda dalam sejarah Bangka: Mencermati Kontribusi legenda dalam Penyusunan sejarah Bangka*, (Jakarta: Cempaka Publising, 2011).

Sistem pengelolaan Tiko ini, kemudian diikuti oleh para tiko lainnya yang rata-rata mereka adalah peranakan Cina Palembang, orang-orang Arab, dan juga bangsawan Palembang yang bergelar Kimas. Tiko mempunyai tugas membiayai operasi penambangan dan biaya hidup sehari-hari para penambang. Kemudian para tiko memperoleh timah untuk kemudian dijual kepada Sultan Palembang dengan harga yang telah ditetapkan oleh VOC. Untuk mengontrol wilayah penambangan dan penyerahan timah kepada Sultan, Sultan Palembang menempatkan para wakilnya di setiap distrik tambang di pulau Bangka. Dalam laporan Residen Inggris, Court pada awal abad XVIII yang bermukim di Mentok, menyebutkan bahwa para tiko tersebut telah memiliki kavling tambang masing masing.

Ketersediaan tenaga yang memadai membawa dampak positif terhadap produksi timah di Bangka. Pada tahun 1740-1750 merupakan periode meningkatnya penyerahan timah dari Palembang ke VOC.⁹ Hal ini menimbulkan pertanyaan: apa dan bagaimana di yang terjadi balik peningkatan drastis produk timah tersebut? Pertanyaan ini terjawab dari adanya isi kontrak-kontrak atau nota kesepahaman antara Sultan Mahmud Badaruddin I dengan pihak VOC. Dalam kontrak-kontrak tersebut Sultan Palembang memper-lihatkan kebijakan ekonominya yang kooperatif dalam menghadapi VOC. Sultan Palembang memperlihatkan cara-cara menggunakan taktik tersebut dalam rangka memenuhi politik monopoli perda-gangan VOC di satu pihak, dan pada pihak lain adalah cara untuk memperoleh keuntungan dengan negosiasi-negosiasi yang menjurus pada perbaikan harga komoditas yang dimonopoli VOC.

Taktik dan strategi Sultan Mahmud Badaruddin I sepertinya tidak menjurus pada perang fisik yang dapat membawa dampak kehancuran pada kedua belah pihak, tetapi justru kelihatan bahwa ia cenderung masuk dalam orbit VOC dengan status resmi sebagai bawahan, namun dalam kenyataannya lebih cenderung memposisikan sebagai hubungan pertemanan dengan VOC. Praktek

⁹ Reinout vos. *Gentle Janus, Merchant Prince: The VOC.....*Appendix II, C, 1993, h. 218. Palembang telah menjual timahnya ke VOC dari 4.704 pikul pada tahun 1740, kemudian naik drastis menjadi 18.483 pikul pada tahun 1748.

hubungan antara Sultan Palembang dengan VOC ini menepis anggapan bahwa selama ini raja-raja Melayu, khususnya Sultan Palembang, selalu dipandang sebagai bawahan atau sub-ordinat dari VOC, yang lemah, tidak berdaya, dan selalu tunduk pada sistem dagang VOC yang monopolistik dengan aturan-aturan kontrak yang dikeluarkan VOC.

Kasus perdagangan timah Sultan Palembang ini bisa menyanggah studi Meilink Roelofs yang sangat berpengaruh dalam penulisan sejarah Indonesia pada masa VOC, bahwa sistem monopoli perdagangan pada masa tersebut diikuti dengan kekerasan fisik, perang antar kedua belah pihak.¹⁰ Dengan adanya revisi, pembaruan dalam kontrak-kontrak antara Sultan Palembang dengan VOC membuktikan adanya kekuatan tawar-menawar yang kuat dalam kasus perdagangan timah maupun lada. VOC dianggapnya tidak saja sebagai aliansi atau sekutu yang berperan sebagai protector yang akan melindunginya ketika berhadapan dengan pihak oposisi kerajaan, tetapi juga dianggapnya sebagai mitra dagang yang sejajar yang harus selalu meninjau kembali kesepakatan-kesepakatan dagang yang telah dibuat.

Era tahun 1740-1750 yang merupakan periode meningkatnya komoditas timah yang diperdagangkan dengan VOC nampaknya berkaitan erat dengan adanya proses negosiasi Sultan Palembang dengan VOC. Negosiasi tersebut di antaranya yang pertama adalah menyangkut masalah perbedaan kebijakan antara mereka.

Di satu pihak, yakni VOC, dalam rangka memuluskan politik monopoli perdagangannya, melarang kapal-kapal asing yang masuk ke perairan Palembang atau juga melintasi sungai Musi, terutama kapal-kapal Inggris, Macao-Portugia, Jung-Jung dari Kamboja, Siam dan Cina.

Perkara yang kesepuluh

..... *Bahwa hendaklah ditentukan oleh Paduka Sri Sultan atau segala timah yang ada di Pulau Bangka atau di Belitung yaitu jangan sekali-kali serahkan kepada tangan*

¹⁰ M.A.P Meilink-Roelofs (ed.), *Dutch Author on Asian History: Selection of Dutch Historiography on the Verenigde Oostindische Compagnie. Dordrecht [etc].* foris Publications, 1998.

lain bangsa melainkan diserahkan kepada Kompeni asal tiada kurang real//

10. Pasal yang kesembilan

Bahwa segala pelayaran dari Palembang (ke Siam) dan dari negeri Cina ke-Palembang adalah tinggal tertegah maka paduka Seri Sulthon Ratu dan Pangeran Ratu tiada saja berjanji dengan seperti kuasa melarang dan mendahului pelayaran itu dan lagi setelah sampai (jung/=kapal kecil) Cina ke Palembang pada berdagang maka dari pasukan perahu itu dan lagi rakyat-rakyat paduka Seri Sulthon Ratu dan Pangeran Ratu apabila hendak pergi dari Palembang dan Bangka serta Belitung ke negeri Cina akan dihukum yang pedih seperti dalam penjara dan syahadan jikalau Paduka Seri Sulthon Ratu dan Pangeran Ratu (.....khabar) yang (rasidunti) kompeni atau orang-orang kompeni yang lain padahal mencuri lada dengan timah hendaklah Paduka Seri Sulthon Ratu dan Pangeran Ratu sukar nyuruh orang memberi tanah kepada gurundur Jenderal dan segala (raad van) India supaya kompeni boleh sekira-kira perahu mengusir kepada orang yang empunya pekerjaan itu adanya

11. Pasal yang kesepuluh

Bahwa Paduka Seri Sulthon Ratu dan Pangeran Ratu berjanji pada melawan dengan seperti kuasa segala perampok di laut Bangka dan di laut Belitung dan siapa-siapanya ada begitu kelakuannya jangan paduka Seri Sulthon Ratu dan Pangeran Ratu bertinggal dalam negeri atau jajahan yang takluk padanya dan pada siapa yang datang sebagai pencuri dan perampok melainkan disuruh berdenda jua Paduka Seri Sulthon Ratu dan Pangeran Ratu lagi pada menyampaikan maksud itu melarang rakyat-rakyat barang suatu apa-apa atau (laskar) jangan membeli kepadanya atau bermufaqat barang sesuatunya maka apabila Paduka Seri Sulthon Ratu dan Pangeran Ratu mengetahui yang rakyat-rakyat melalui perintah itu maka dihukum dengan yang pedih seperti mana isti'adat kerajaan negeri Palembang maka kompeni berjanji yang orang-orangnya tiada boleh

sekali-kali padahal (mengharu-biru) atau mangku rakyat-rakyat dalam negeri Palembang atau di Selat Bangka atau di sungai Palembang atau barang tempat yang jauh barang sesuatu salah maka Kompeni hukum dengan yang amat pedih seperti mana paduka Seri Sulthon Ratu dan Pangeran Ratu jua berjanji apabila ada begitu keadaannya terdapat tiada dihukum seperti mana menyertai dengan salahnya.

Oleh Karena itu, VOC mengadakan pengawasan yang ketat terhadap kapal-kapal asing tersebut, termasuk jung-jung atau perahu-perahu kecil penduduk yang berniaga di sepanjang sungai Musi. Dari salah satu sumber¹¹ diketahui bahwa ternyata kapal-kapal dan jung-jung yang berisi timah tersebut telah dibawa langsung ke Cina lewat Siam dan Kamboja. Adapun larangan keras VOC di bawah kekuasaan Residen Gerard Pan, yakni berisi kebijakan yang akan menutup perairan Palembang dan Bangka di sepanjang sungai Musi untuk kapal-kapal dan jung-jung milik Siam dan Kamboja. Namun kebijakan VOC ini tidak diterima Kesultanan Palembang yang dalam statusnya sebagai sub-ordinat VOC. Meski dalam posisi sub-ordinat dan mengharap proteksi dari VOC dalam menghadapi pihak-pihak oposisi, Sri Sultan Palembang mengutamakan kepentingan rakyat. Dalam masalah perdagangan timah, jika kebijakan VOC tersebut disepakati, tentu akan berdampak melumpuhkan ekonomi dan dapat menyengsarakan rakyat dan hal ini bagi Sultan perlu diutamakan. Itulah sebabnya Sultan Palembang tidak menyetujui kebijakan VOC tersebut, dengan alasan bahwa jika rute perdagangan dengan Siam dan Kamboja tersebut ditutup, maka bisa dipastikan Palembang tidak akan mendapatkan suplai beras dari kedua daerah tersebut. Sultan beranggapan hal tersebut juga akan merugikan pihak VOC, karena akan mengakibatkan pihak VOC tidak bisa mendapat suplai timah dan lada dalam jumlah yang besar, dikarenakan para petani lada di daerah hulu Palembang akan menggantikan tanaman lada tersebut dengan padi sebagai bahan makanan pokok mereka apabila mereka sampai terjadi kekurangan pangan. Di samping itu, para penambang

¹¹ ARA-Den Haag, *Surat dari Sultan Palembang ke Batavia*, 13 Maret 1747 dalam Arsip VOC no 2699. F. 49.

pun akan mogok kerja jika terjadi kekurangan pangan, disebabkan krisis beras. Sementara itu pada masa tersebut harga beras di Jawa jauh lebih mahal jika dibanding dengan harga beras yang berasal dari Siam dan Kamboja. Sultan beranggapan jika VOC membuka kembali rute perdagangan tersebut dan membiarkan kapal-kapal dan jung-jung dari Siam dan Kamboja memasuki perairan Palembang, maka VOC tidak perlu khawatir akan kekurangan suplai lada dan timah. Inilah bentuk negosiasi yang nyata yang dilakukan oleh Sultan Palembang dalam menerapkan kebijakan ekonomi di wilayahnya.

Adapun bentuk negosiasi yang kedua adalah mengenai ketidaksepahaman antara Sultan Palembang dengan VOC terhadap kontrol mereka atas perahu-perahu kecil yang berlalu lalang untuk keperluan berdagang dalam partai kecil di sekitar perairan Palembang. Menurut Sultan, keberadaan perahu-perahu kecil tersebut tidaklah perlu untuk diawasi. Sedangkan negosiasi yang ketiga yakni mengenai protes Sultan Palembang terhadap perilaku Residen VOC yang tidak konsisten dalam menjalankan tugasnya berkaitan dengan perdagangan timah, maka sebaiknya diganti. Di sinilah ke-lihatan bahwa pihak VOC ternyata juga ingin mengambil upaya mendapat ‘keuntungan diam’ dengan cara diam-diam berjualan dengan pihak-pihak lain. Ketiga negosiasi tersebut akhirnya dika-bulkan pihak VOC dengan membuka kembali jalur perdagangan yang lama antara Palembang-Kamboja dan Siam, kemudian VOC tidak lagi mengawasi keberadaan perahu-perahu yang berlalu lalang dalam aktivitas berdagang serta penggantian Residen VOC yang lama.

Dari sumber yang ada diketahui bahwa dampak adanya negosiasi tersebut membawa ke arah yang positif dan menguntungkan bagi pihak Sultan Palembang. Dengan dikabulkannya negosiasi tersebut Sultan Palembang memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan timah dalam jumlah yang lebih besar lagi. Dari beberapa sumber naskah kontrak-kontrak dagang¹² antara Sultan Palembang dan pihak VOC antara periode tahun 1740-1800 diketahui bahwa telah terjadi berkali-kali dibuat kesepakatan-kesepakatan baru dalam rangka membahas harga

¹² ANRI. Jakarta. *Contract Palembang*, dalam Arsip VOC.

monopoli VOC dengan harga premi, terutama jika timah berkurang masuk ke loji Belanda di Palembang untuk kemudian dikirim ke kantor pusat VOC di Batavia. Bagi Sultan keluhan VOC tentang menurunnya penyerahan timah selalu diberi alasan, misalnya: “semakin berku-rangnya deposit timah jika hanya digali dangkal”. Penggalan yang lebih dalam dengan waktu kerja yang lebih lama memerlukan biaya produksi yang lebih tinggi daripada masa sebelumnya. Ataupun juga dengan menemukan deposit-deposit timah yang kaya di daerah lain di wilayah Bangka. Adapun hasil negosiasi-negosiasi tersebut nampaknya berhasil, hal ini terbukti bahwa pihak VOC kemudian memperbarui kontrak lamanya dengan kesepakatan-kesepakatan yang baru pula.

Dari uraian di atas tampak bahwa secara resmi Sultan Palembang sebagai bawahan VOC yang harus taat dan patuh terhadap protektornya, serta harus menjalankan aturan-aturan yang telah dibuat yang menyertai monopoli perdagangan. Sultan Palembang telah mematuhi kontrak-kontrak yang ada dengan menyerahkan timah kepada VOC, tetapi seberapa besar timah yang diserahkan tidaklah menjadi pertimbangan. Meskipun secara resmi Sultan Palembang berstatus ‘bawahan’ VOC, dalam prakteknya ada kesejajaran dalam perundingan-perundingan berkaitan dengan penentuan harga, premi, dan juga hal-hal hubungan dagang dengan bangsa lain. Dalam hal ini, proses negosiasi Sultan dengan VOC yang berlangsung merupakan realitas historis yang perlu dimaknai. Hal-hal yang telah dilakukan oleh Sultan Palembang berkenaan dengan perdagangan timah dan lada merupakan “strategi perang timah dan lada” dengan VOC. Keterlibatan Sultan dalam perdagangan timah dengan kelompok dagang ‘non-VOC’ menurut VOC adalah ilegal, tetapi menurut Sultan hal itu bukan ilegal atau selundupan. Dalam istilah lokal hal ini biasa disebut dengan istilah *sembunyi berdagang untuk mencari keuntungan diam*. Dalam kalkulasi ekonomi, Sultan maupun pedagang pribumi sadar akan dampak yang ditimbulkan jika perdagangan timah dan lada dipasarkan ke pasar bebas.

Lalu bagaimana dampak dari *strategi perang timah dan lada* antara Sultan Palembang dengan VOC? Beberapa indikasi dapat membuktikan bahwa strategi tersebut ternyata berdampak positif bagi Sultan Palembang sendiri maupun bagi perkembangan

ekonomi negeri Palembang pada masa itu. Keuntungan yang diperoleh dari bisnis timah dan lada tersebut telah membuat Sultan Palembang dapat membiayai proyek-proyek besar untuk memperkuat hegemoni kekuasaannya. Di antaranya adalah pembangunan sarana prasarana berupa masjid yang besar dan megah yang diprakarsai oleh Sultan Mahmud Badaruddin I dan pembangunan istana yang megah. William Marsden yang pernah mengelilingi Sumatra dan singgah di Palembang membuat kesaksian bahwa di negeri ini aman kondisinya, melimpah kekayaannya, dan mempunyai mata uang sendiri yang terbuat dari timah yang dikenal dengan nama 'pitis'.¹³ Timah dan lada merupakan sumber utama Kesultanan Palembang dan pada masa itu telah membawa negeri ini menjadi negeri yang kaya.

Warisan Sejarah Peradaban Islam di Palembang

Berbagai realitas historis telah membuktikan bahwa perkembangan Islam tidak lepas dari aktivitas ekonomi. Sampai abad XVII keberadaan Islam tidak mengubah secara struktural struktur dan perilaku ekonomi setempat. Aktivitas ekonomi masih terpusat pada penguasa dan negara. Meski demikian, Sultan Mahmud Badaruddin I, sebagai salah satu penguasa di Palembang, telah memperlihatkan bagaimana kebijakannya mempunyai dampak positif bagi perkembangan peradaban Islam di Kesultanan Palembang.

Perkembangan peradaban Islam di Palembang dapat dibuktikan dengan dibangunnya sarana prasarana sebagai institusi keislaman, seperti Masjid Agung yang besar dan megah yang diprakarsai Sultan Mahmud Badaruddin I dan pembangunan Istana yang megah. Masjid Agung Palembang ini mempunyai arsitektur yang khas. Atapnya berbentuk limas yang bernuansa Cina dengan bagian ujung atapnya melengkung ke atas. Arsitek pembangunan masjid ini adalah seorang asal Eropa, dan beberapa bahan bangunannya seperti marmer dan kaca, diimpor dari Eropa. Jadi arsitektur bangunan masjid ini merupakan perpaduan antara arsitektur Eropa

¹³ William Marsden, *The History of Sumatra*, (Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1975), h. 361.

dan Cina. Masjid Agung Palembang sebagai salah satu institusi keislaman menandakan perkembangan Islam di Palembang.

Pembangunan Istana yang megah oleh Sultan Mahmud Badaruddin I ini sebagai simbol dan representasi atas hegemoninya. Namun perlu dicatat bahwa istana pada saat itu juga sebagai pusat intelektual Islam di Palembang. Pada masa Sultan Mahmud Badaruddin I kegiatan intelektual yang dilakukan oleh para ulama didukung penuh oleh Sultan. Kegiatan penyalinan kitab-kitab keagamaan dan kegiatan para ulama yang menghasilkan karya intelektual, baik di bidang fiqih, tauhid, maupun tasawuf tumbuh subur. Bahkan pada masa itu Palembang dikenal sebagai salah satu skriptorium terbesar. Koleksi karya keagamaan tersebut disimpan oleh para ulama setempat dan banyak pula disimpan di istana Kesultanan Palembang.

Dalam konteks keilmuan Islam di dunia Melayu, Palembang tercatat sebagai salah satu pusat tumbuh-suburnya berbagai pengetahuan, baik yang berkaitan dengan sastra maupun agama. Di antara bukti yang mengindikasikan hal tersebut adalah dijumpainya berbagai naskah keagamaan, yang asal-usulnya merujuk ke wilayah ini, baik karena penulis atau penerjemahnya berasal dari Palembang, maupun karena semata-mata ditulis atau diterjemahkan di Palembang. Umumnya, berbagai karangan dan terjemahan yang dijumpai tersebut berasal dari periode pertengahan abad 18 M hingga awal abad 19 M.

Dapat dipastikan bahwa bangkitnya Palembang sebagai salah satu kubu Islam di dunia Melayu ini tidak bisa lepas dari munculnya Kesultanan Palembang pada awal abad 17 M, di mana sejak awal para Sultannya telah mulai menunjukkan minat yang khusus pada bidang keagamaan, dan mendorong tumbuhnya pengetahuan dan iklim keilmuan di bawah patronase mereka. Munculnya apa yang biasa disebut sebagai “minat khusus” para Sultan itu, tampaknya juga terkait dengan kenyataan bahwa sejak awal berdirinya, Palembang sudah banyak berinteraksi dengan para ulama Arab yang, menjelang pertengahan abad 17 M, beberapa di

antaranya berhasil mencapai kedudukan menonjol di istana Kesultanan Palembang.¹⁴

Dalam konteks tradisi kekuasaan Islam Melayu, fenomena para Sultan Palembang yang banyak menjadikan tokoh-tokoh agama sebagai patron keilmuan mereka, merupakan gejala umum yang terjadi. Di Aceh misalnya, pada masa keemasan kesultannya, muncul ulama-ulama yang bertindak sebagai “patron keilmuan” penguasa. Demikian halnya di Palembang, sejak awal para Sultan yang berkuasa telah memberikan kontribusi atas terciptanya atmosfer keilmuan di wilayah ini. Para sultan Palembang periode awal, misalnya, sangat proaktif melakukan usaha-usaha untuk menarik perhatian sejumlah ulama Arab agar mau berkunjung dan tinggal di wilayahnya. Salah satu upaya yang dilakukan oleh para Sultan Palembang untuk menarik minat para migran Arab agar datang ke Palembang adalah melalui kerjasama ekonomi. Hasilnya, para migran Arab, terutama dari Hadhramaut, mulai berdatangan ke Palembang dalam jumlah yang semakin besar sejak abad 17 M, bahkan sebagian di antara mereka memilih untuk menjalin hubungan kekerabatan melalui pernikahan, dan akhirnya tinggal dan menetap di Palembang. Upaya-upaya para Sultan Palembang seperti ini tidak hanya dilakukan terhadap para ulama Arab, tetapi juga terhadap etnis lain, seperti Cina, sehingga Kesultanan Palembang pada masa itu menjadi sangat kosmopolit.

Menjelang pertengahan abad 18 M di Kesultanan Palembang telah muncul beberapa ulama Arab yang belakangan memainkan peranan penting dalam pertumbuhan tradisi keilmuan Islam di wilayah ini.¹⁵ Para ulama Arab tersebut banyak memberikan kontribusi terhadap keberadaan istana di Palembang sebagai pusat pengetahuan yang mana koleksi besar karya-karya keagamaan para ulama setempat banyak disimpan di istana tersebut. Hal ini, menegaskan pula bahwa tesis tentang Islam sebagai fenomena istana, yang menempati posisi strategis dalam wacana keilmuan Islam di wilayah kepulauan Melayu-Indonesia.

¹⁴ Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2004), h. 304.

¹⁵ *Ibid.*, h. 305.

Dengan latar belakang sosial-politik yang demikian, tidak heran jika pada periode-periode berikutnya, terutama antara abad 18 M dan 19 M, Palembang telah melahirkan sejumlah ulama penting yang produktif pada zamannya, seperti Shihabuddin bin Abdullah Muhammad, Kemas Fakhruddin, Muhammad Muhyiddin, dan Kemas Muhammad bin Ahmad. Di antara mereka yang paling menonjol serta paling berpengaruh adalah Syaikh Abdussamad al-Palimbani. Para ulama ini telah memberikan kontribusi penting terhadap munculnya tradisi keilmuan Islam di Palembang khususnya dan di Melayu-Indonesia pada umumnya, dengan mengarang dan menerjemahkan kitab-kitab keagamaan, sehingga masyarakat Muslim di wilayah ini bisa mengakses berbagai pengetahuan keislaman.

Setidaknya ada dua faktor utama yang melatarbelakangi munculnya Palembang sebagai pusat keilmuan Islam, termasuk di dalamnya tradisi menulis dan menerjemahkan kitab-kitab keagamaan. *Pertama*, karena situasi sosial politik Kesultanan Palembang yang sangat kondusif untuk pengembangan iklim keilmuan, di mana ulama sering menjadi patron keilmuan para Sultan. Kemesraan antara ulama dan Sultan Palembang terutama terjadi pada masa Kemas Fakhruddin, yang menjadi ulama istana saat Sultan Ahmad Najamuddin berkuasa hingga tahun 1774 M, dan berlanjut pada masa Sultan berikutnya, yakni Sultan Muhammad Bahauddin (1774 – 1804 M). Tidak heran, jika umumnya, karya-karya terjemahan Kemas Fakhruddin merupakan pesanan dari sang Sultan.

Kedua, kontak intelektual dan transmisi keilmuan yang terjadi antara para ulama Melayu-Indonesia (ulama Jawi), termasuk di dalamnya para ulama Palembang, dengan para ulama di pusat dunia Islam, khususnya Makkah dan Madinah. Kemampuan para ulama Palembang menulis dan menerjemahkan berbagai kitab keagamaan, setidaknya mengisyaratkan kepada kita bahwa mereka mumpuni dan menguasai bahasa Arab dengan baik. Sayangnya, hingga kini biografi lengkap dari Shihabuddin bin Abdullah Muhammad belum banyak diketahui. Sulit untuk tidak menduga bahwa Shihabuddin pernah belajar di Arab, atau setidaknya melakukan kontak intelektual, meskipun tidak langsung, secara intens dengan ulama di berbagai pusat keilmuan Islam, terutama di Haramayn, mengingat

kemampuan menerjemahkan, apalagi mengarang, teks-teks berbahasa Arab membutuhkan penguasaan atas bahasa tersebut secara aktif dan optimal.

Peranan orang Arab memang sangat penting di Palembang pada masa Kesultanan. Di antara mereka, selain dipercaya sebagai ulama istana yang tugasnya sebagai penasehat Sultan, mereka ini juga sebagai elit ekonomi yang bergerak di sektor transportasi laut. Hal ini terbukti dari kepemilikan 10 kapal milik pedagang Arab pada tahun 1759 M, meningkat menjadi 40-an kapal pada periode 1795-1796 M. Dalam satu hasil penelitian, disebutkan bahwa 50% aktivitas pelayaran di pelabuhan Semarang dikuasai oleh Arab-Palembang. Oleh karena itu pada periode 1795-1796 M sejumlah 20 kapal dari 36 kapal yang meninggalkan Palembang untuk rute Malaka adalah milik Arab-Palembang keturunan Hadramaut.¹⁶

Kesimpulan

Perdagangan timah dan lada yang digerakkan para Sultan Palembang di bawah monopoli VOC sepertinya tidak bisa begitu saja diartikan sebagai bisnis yang lemah di bawah kendali pihak monopoli dengan balasan berupa proteksi. Karena dalam prakteknya, sistem monopoli perdagangan timah dan lada mengalami proses negosiasi yang diinisiatifkan oleh Sultan Palembang. Proses negosiasi tersebut di antaranya berkenaan dengan masalah peningkatan harga komoditas dan premi yang diperoleh. Proses negosiasi yang dilakukan Sultan ini ternyata memiliki kekuatan yang cukup kuat. Salah satunya dapat dibuktikan dengan adanya beberapa dari isi kontrak-kontrak yang terlarang tersebut kemudian bisa mendapatkan izin, antara lain adalah berkenaan dengan membuka hubungan dagang dengan Siam dan Kamboja serta tidak terganggunya kondisi keamanan bagi Sultan Palembang dan para pedagang Melayu lainnya ketika berdagang dengan para pedagang non VOC, seperti pedagang dari Macao, Portugal, Perancis, Inggris, dan Cina. VOC memang secara resmi memiliki kuasa tertinggi di Palembang, akan tetapi dalam prakteknya kedaulatan tetap berada di tangan Sultan Palembang,

¹⁶ Barbara Watson Andaya, *To Live as Brothers: Southeast Sumatra in the Seventeenth and Eighteenth* (Honolulu: Univ. of Hawaii Press, 1993), h. 221.

karena VOC tidak pernah diizinkan untuk masuk ke wilayah pedalaman.

Sultan Palembang dalam hal perdagangan timah telah memanfaatkan kesempatan yang bertolak belakang. Oleh karena di satu pihak Sultan berbisnis resmi (legal) dengan protektornya, yakni VOC, namun pada sisi yang lain Sultan juga melakukan bisnis timah yang tersembunyi di pasar gelap untuk menghasilkan keuntungan diam. Pada kelanjutannya Sultan Palembang juga memanfaatkan kesempatan memperdagangkan produk-produk lain yang terlarang menurut versi VOC bagi keperluan penambang timah. Ternyata hasil dari bisnis timah telah membawa kemakmuran bagi kesultanan Palembang dan membawa kemajuan peradaban dengan membangun sarana transportasi maupun membangun institusi institusi keislaman. Melalui pemahaman bahwa sejarah adalah sejarah masyarakat, maka dalam berbagai aspek sosial dari aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan Islam bisa diungkap. Perkembangan peradaban Islam di Palembang abad 17 M sampai awal abad 19 M ternyata tidak dapat dipisahkan begitu saja dengan aktivitas ekonomi penguasa dan masyarakat.

Daftar Pustaka

Manuskrip

- ANRI: Katalog Palembang. No. 41.6 *Renovasi de Contracten met de Koningen van Palembang Dee 1622, 1678, 1679 en 1684* Det 25 Januari 1691 M.
- ANRI: Katalog Palembang. No. 41.8 *Contract Palembang 10 September 1755.*
- ANRI: Katalog Palembang 41.9 *Renovatie der Contracten Tirs schen den Koming van Palembang En Comp 15 Juni 1763.*
- ANRI: Katalog : Palembang 41. 10 *Contract met Palembang 25 Desember 1775 .*
- ANRI: Katalog Palembang 41.7 *Renovatie de Contracten met Sulthan Seri Ratu .. Palembang 2 Juni 1722.*
- ANRI: Katalog Palembang 41/11, *Original Acte van Renovatie der voorige Contracten met de Koningen van Palembang, Met den Paduka Seri Sulthan Ratu Muhammad Baha'uddin, en den kroon prins Pangeran Ratu, Op den 31 Agustus 1791 en 28 November 1791.*
- ANRI: Katalog Palembang, 66/9 *Qaull al-Haq Wakalamah al-Shadiq.*
- ANRI: Katalog Palembang 15 DV-16 *Contract met Palembang.d 18 Agustus 1823 M*
- ANRI: *Surat-Surat Sultan Palembang (SSSP).*
- ARA-Den Haag, *Surat dari Sultan Palembang ke Batavia*, 13 Maret 1747 dalam arsip VOC no 2699. F. 49.

Buku-Buku

- Ali, Amin. 1986. “Sejarah Kesultanan Palembang dan Beberapa Aspek Hukumnya” dalam K.H.O Gadjah Nata dan Sri-Edi Swasono (Ed). *Masuk dan Berkembangnya Islam di Sumatera Selatan*. Jakarta: UI Press.
- Andaya, Barbara Watson. 1993. *To Live as Brothers: Southeast Sumatra in the Seventeenth and Eighteenth*. Honolulu: Univ.of Hawaii Press.
- Azra, Azyumardi. 2004. *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Marsden, William. 1975. *The History of Sumatra*. Kuala Lumpur: Oxford University Press.
- M.A.P Meilink-Roelofs (ed.). 1998. *Dutch author on Asian History: selection of Dutch Historiography on the Verenigde Oostindische Compagnie. Dordrecht [etc].* foris Publications.
- Sutedjo, Sujitno. 2011. *Legenda dalam Sejarah Bangka: Mencermati Kontribusi Legenda dalam Penyusunan Sejarah Bangka*. Jakarta: Cempaka Publising.
- Reinout vos. 1993. *Gentle Janus, Merchant Prince: The VOC and The Tightrope of diplomacy in the malay Word, 1740-1800*. Leiden: KITLV Press.

Lampiran 1 : Masjid Agung Palembang



Lampiran 2 :
Naskah kontrak-kontrak Sultan Palembang di antaranya :

*Renovatie de Contracten met Sulthan Seri Ratu .. Palembang 2
Juni 1722*

Contract Palembang 10 September 1755



